



**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR (PERIODE TAHUN 2015 - 2019)**

Skripsi

Diajukan oleh:

Diah Masyita Khosyatillah

0221 16 141

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2022



**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR (PERIODE TAHUN 2015 - 2019)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA, CFE)



**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR (PERIODE TAHUN 2015 - 2019)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

pada hari : Kamis, tanggal 21 April 2022

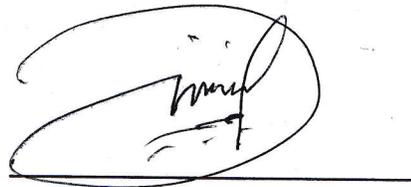
Diah Masyita Khosyatillah

0221 16 141

Disetujui,

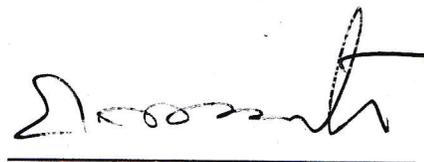
Dosen Penguji

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)



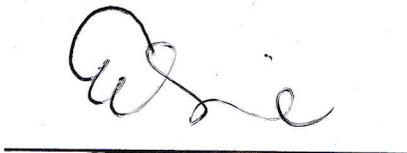
Ketua Komisi Pembimbing

(Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak.,
CFE., CFA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Dessy Herlisnawati, S.E., M.M., CAP)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Masyita Khosyatillah

NPM : 0221 16 141

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor (Periode Tahun 2015-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, April 2022



Diah Masyita Khosyatillah

0221 16 141

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

ABSTRAK

Diah Masyita Khosyatillah, 022116141, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2015-2019. Dibawah Bimbingan Ernadhi Sudarmanto dan Dessy Herlisnawati. 2022.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja yaitu kinerja manajerial sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dengan anggaran kinerja akan terlihat juga hubungan yang jelas antara *input*, *output*, dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara parsial dan *adjusted R* terhadap kinerja manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2015-2019. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan desain penelitian kasual, dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan menyebarkan data kuesioner langsung ke Satuan kinerja yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sejumlah 70 responden dan mengambilnya kembali setelah jangka waktu yang telah ditetapkan. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana menggunakan software SPSS versi 25.

Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dan *Adjusted R square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Positif terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dilihat dari uji parsial yang menunjukkan bahwa t -hitung lebih besar dari t -tabel yaitu $4,640 > 1,676$ dengan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ dan *Adjusted R* sebesar 70,9% dan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Manajerial

PRAKATA

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2015 – 2019”. Yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Penelitian ini dibuat guna memenuhi tugas dan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan baik doa, dukungan moril maupun materil dan bantuan apapun yang sangat berpengaruh bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua yang sangat penulis sayangi Ayahanda Bapak Hendi Mulya R dan Ibunda Sutiah, skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kalian karena ini sebagian dari perjuangan kalian juga, terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan Kasih Sayang, Doa, Semangat, Dukungan baik moril maupun materil yang diberikan setulus hati kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Ernadhi Sudarmanto, AK., M.M., M.AK., CFE., CfrA., CA., QIA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Ibu Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si. Selaku Anggota Komisi Pembimbing.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Dewi Sevie Amelia, Resty Mardiana, Resky Septiyan, Firnindha Oktaviane, Nabila Anggraini, Resti Putri dan Nanda Rianti Syafira yang selalu menemani dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman Akuntansi CD Angkatan 2016 yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan didalam skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalam skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, April 2022

Penulis

Diah Masyita Khosyatillah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	6
2.2 Anggaran Berbasis Kinerja.....	6
2.2.1 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja	8
2.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	9
2.2.3 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	10
2.2.4 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja	10
2.3 Kinerja Manajerial	11
2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	13
2.4.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.4.2 Kerangka Pemikiran	15

2.5 Hipotesis Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	18
3.2.1 Objek Penelitian.....	18
3.2.2 Unit Analisis	18
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	19
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	19
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	21
3.6 Metode Pengumpulan Data	21
3.7 Metode Analisis Data.....	21
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	21
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	22
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	23
3.7.3.1 Uji Normalitas.....	23
3.7.3.2 Uji Heterokedastisi.....	23
3.7.4 Uji Hipotesis.....	24
3.7.4.1 Uji t.....	24
3.7.4.2 Uji R.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	25
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
4.1.1 Sejarah Perkembangan Kabupaten Bogor	25
4.1.2 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bogor	26
4.1.3 Aspek Geografis Kabupaten Bogor.....	27
4.1.4 Sejarah dan Perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.....	29
4.1.5 Kegiatan Usaha.....	29
4.1.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	30
4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	43
4.2.1 Deskripsi Data	43
4.2.2 Deskripsi Anggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019.....	44

4.2.3 Deskripsi Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019	46
4.3 Analisis Data	48
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	48
4.3.1.1 Uji Validitas	48
4.3.1.2 Uji Reabilitas	51
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	51
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	51
4.3.2.2 Uji Heterokedasitas.....	53
4.3.3 Uji Hipotesis	54
4.3.3.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	54
4.3.3.2 Uji Adjusted R (Uji R ²).....	55
4.4 Pembahasan.....	56
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian	58
BAB V_SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2015-2019	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1	Jenis, Metode dan Teknik Penelitian	18
Tabel 3.2	Operasional Variabel.....	20
Tabel 3.3	Pengelolaan Skala Pengukuran dalam Kuisisioner	22
Tabel 4.1	Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuisisioner.....	43
Tabel 4.2	Karakteristik Responden	43
Tabel 4.3	Anggaran Berbasis Kinerja (X)	45
Tabel 4.4	Kinerja Manajerial (Y)	46
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel (X) Anggaran Berbasis Kinerja	49
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas (Y) Kinerja Manajerial	49
Tabel 4.7	Hasil Uji Reabilitas Variabel (X) Anggaran Berbasis Kinerja	51
Tabel 4.8	Hasil Uji Reabilitas Variabel (Y) Kinerja Manajerial.....	51
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Test.....	52
Tabel 4.10	Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	54
Tabel 4.11	Hasil Uji Adjusted R (Uji R ²)	55
Tabel 4.12	Perkembangan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2015-2019 (dalam Rp)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	17
Gambar 2.2	Hipotesis Penelitian	17
Gambar 4.1	Diagram Scatterplot	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	63
Lampiran 2.	Kuisisioner.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi Keuangan Negara ditandai dengan adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Namun, pada implementasinya masih menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya terkait pengendalian anggaran yang belum efektif. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggara keuangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Hal tersebut berdampak pada realisasi anggaran daerah yang belum tersalur secara maksimal.

Adanya perilaku masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menurut kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat serta tuntutan terhadap transparansi keuangan. Oleh karena itu, reformasi di bidang keuangan terus dilakukan dan lahirlah Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang berfungsi sebagai penggerak dengan ditetapkannya Anggaran Berbasis Kinerja.

Pemberlakuan otonomi daerah berakibat pada terjadinya dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dinamika perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta beberapa Undang-Undang maupun aturan-aturan lain yang memang menjadi regulasi terhadap berbagai pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Keadaan tersebut mendorong perkembangan praktek dan teori pada bidang akuntansi sektor publik menjadi begitu pesat.

Pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perkembangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP No 58 Tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

Maka dilakukan Penelitian ini adalah untuk melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah), dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah daerah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Dalam lakip yang terpublikasi dari tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat pada Data yang sudah dikelola terlebih dahulu oleh peneliti yang tersaji sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2015-2019
(dalam Rp)

No	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2015	40.158.095.000	35.752.981.428	4.405.113.572	89,03%
2	2016	44.886.594.000	42.524.368.064	2.362.225.936	94,74%
3	2017	35.152.350.000	33.980.072.081	1.172.277.919	96,67%
4	2018	36.233.680.000	35.673.346.328	560.333.672	98,45%
5	2019	20.967.938.000	20.622.442.408	345.495.592	98,35%

Sumber : situs web resmi bappeda litbang

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah belanja daerah yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, ini menunjukkan dalam penyusunan anggaran belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, sedangkan dalam konteks pemerintahan, kinerja akan dinilai sebagai suatu prestasi dalam melaksanakan kegiatan karena kinerja mengacu pada hasil yang telah dilakukan.

Dan tabel diatas juga menunjukkan peningkatan pencapaian realisasi anggaran pada setiap tahunnya, dari tahun 2015-2016 mencapai 5,71%, tahun 2016-2017 mencapai 1,93%, tahun 2017-2018 mencapai 1,78% akan tetapi pada saat tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,10% walaupun tidak mengalami penurunan yang signifikan namun dapat dikatakan dalam hal efisiensi belum dilakukan kegiatan secara optimal karena belum sesuai target yang diinginkan. Dan standar efisiensi atau tidaknya dapat dilihat dari anggaran yang masih sisa karna masih banyak program-program yang belum terealisasi dengan baik dapat dikatakan bahwa hal tersebut kurang efisien.

Dengan demikian ini dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial yang telah masyarakat percayakan terhadap Instansi Pemerintah serta Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dimana visinya adalah “terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia”. Sedangkan misinya adalah “meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana, meningkatkan hasil guna produk

perencanaan dan evaluasi pembangunan, mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan”.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris, Ir, RR, Emy Sriwahyuni, M.Si, Kepala Bappedalitbang Kab. Bogor mengharapkan agar para aparat perencana dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat melalui kegiatan bimtek ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik dengan lebih tepat, cepat, terencana, terstruktur, dan terukur. Dengan telah dilaksanakannya bimtek ini diharapkan pula akan menjadi langkah yang baik dalam upaya meningkatkan efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah, pencapaian tujuan, sasaran dan program dalam berbagai tatanan pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hubungan antar variabel bahwa proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding dengan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (inovasi) dan strategi untuk menyiasati keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, ukuran kinerja dalam anggaran memberikan dorongan kepada para pelaksana anggaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi satu ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keterbatasan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan publik terhadap pemerintah.

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang dapat memahami konsep pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wati Sitohang (2018) dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah pada pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja ini dan dengan adanya pemahaman yang benar dapat menghilangkan rasa saling curiga, tidak percaya dan terwujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga pemerintah yang baik dapat bersama-sama diwujudkan.

Melihat berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini merupakan pengembangan atau replika dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda dan responden yang berbeda. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dilihat dari situs web resmi bappeda litbang bahwa Bimbingan Teknis penguatan manajemen kinerja ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para aparatur perencana Bappedalitbang tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang sektor SKPD sesuai tahapan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan evaluasinya dan juga untuk meningkatkan kualitas para aparatur perencana Bappedalitbang dengan cara mempertajam pemahaman terhadap substansi Permendagri 86 Tahun 2017, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Mengingat pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholder-nya untuk menciptakan kinerja yang baik serta laporan keuangan yang terpercaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang penerapan anggaran berbasis kinerja agar dapat memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan serta mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan secara transparan kepada publik dalam terwujudnya pelayanan publik yang baik.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019?
2. Bagaimana gambaran kondisi Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019?
3. Bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai maksud untuk menguji dan menganalisa pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Anggaran Berbasis Kinerja yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui gambaran kondisi Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengetahui pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial.
- 2) Menyediakan informasi tambahan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial.
- 3) Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang di Instansi Pemerintahan

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Definisi akuntansi sektor publik menurut Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Dari definisi-definisi diatas akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan program.

Menurut Yunita (2010:99) dinyatakan bahwa penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Dan anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan anggaran harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Menurut Halim dan Iqbal (2012:173) penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Menurut Abdul Halim (2012:1777) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja adalah metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Sedangkan menurut Darise (2013:146) Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dengan anggaran kinerja akan terlihat juga hubungan yang jelas antara *input*, *output*, dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.

Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2011: 79-83) berikut ini :

- 1) Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)
- 2) Pembuatan Tujuan
- 3) Penetapan Aktivitas
- 4) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Adapun penjelasan mengenai beberapa tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah dikutip diatas adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
- d. Memiliki orientasi masa depan
- e. Memerlukan seluruh unsur organisasi
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

2. Pembuatan Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut ini :

- a. Mempersentasikan hasil bukan keluaran
 - b. Dapat diukur, untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah dicapai
 - c. Dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi
 - d. Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu
3. Penetapan Aktivitas
- Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah unit atau paket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen sebagai berikut :
- a. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas
 - b. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak
 - c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut
 - d. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (*output*) dan hasil (*outcome*) pada beberapa tingkat pendanaan
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
- Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria dalam menentukan peringkat. Teknisnya, alternatif keputusan dari setiap aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan prioritasnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja secara teknis operasional akan terlihat pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat anggaran dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD tersebut berisi rencana tolak ukur kinerja, program, dan kegiatan disertai dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya beserta usulan anggaran yang diperlukan dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan suatu cara terstruktur dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja didalam suatu unit instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan anggarannya kepada DPR dan masyarakat.

2.2.1 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasisifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi yang maksimal yang anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Nordiawan (2011:58) adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja
2. Menyelidiki dan mengukur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya
3. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010:82) adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas.
2. Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan.
3. Pada tingkat yang lebih maju, pendekatan ini dicirikan dengan unit costing untuk setiap aktivitas.

Chabib Shaleh dan Heru Rohmansyah (2010:50) menyebutkan anggaran berbasis kinerja ditandai dengan karakteristik umum yaitu komprehensif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perangkat prioritas, analisa total *cost* dan *benefit*, berorientasi *input*, *output*, dan *outcome*, serta pengukuran dan pengawasan kinerja.

2.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip anggaran berbasis kinerja antara lain transparansi yang merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi anggaran, akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta ekonomis, efektif, dan efisien yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya yang murah, penggunaan dana masyarakat yang efisien dan dapat mencapai target/tujuan pelayanan publik.

Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja menurut Halim dan Iqbal (2012:174) adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
2. **Disiplin Anggaran**
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan pelaksanaan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.
3. **Keadilan Anggaran**

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output dan outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil kinerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Pendekatan proses perencanaan dan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan rencana kerja dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan *output* yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan *output* tersebut.

2.2.3 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Pentingnya mengemukakan Manfaat yang dapat diperoleh dari anggaran berbasis kinerja yang dapat dirasakan oleh Masyarakat, Kepala daerah selaku manajemen, aparatur dan Satuan Kerja, dibawah ini manfaat anggaran berbasis kinerja khususnya dipemerintahan atau sektor publik menurut Mardiasmo (2009:63) :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintahan untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.2.4 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita harus fokus pada “apa yang ingin dicapai”. Jika fokus ke “output”, berarti pemikiran tentang “tujuan” kegiatan harus tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada penatalaksanaan sehingga selain efisiensi

penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Tahap-tahap dalam Siklus Anggaran Berbasis Kinerja, Mardiasmo (2009:70) menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas serta kesiapan mental yang tinggi. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Implementasi

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

2.3 Kinerja Manajerial

Pengertian kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, kinerja manajerial ini diukur dengan mempergunakan indikator.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Menurut Hamzah (2013) Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.

Mahmudin (2011 : 25) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Sedangkan Bastian (2010) mendefinisikan bahwa Kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan dimasa mendatang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut. Efisiensi mempunyai dua makna yaitu :

- a. Kinerja suatu program atau kegiatan sangat baik.
- b. Dampak yang maksimum berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan.

Kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal.

Menurut Pabundu (2010 : 121) kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial merupakan kegiatan yang penting dalam perusahaan atau organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tingkat efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dikutip dari Penelitian (Wati Sitohang,2018) Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan, Kinerja manajerial merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja keuangan dengan standard an kriteria yang telah ditetapkan. Digunakannya kinerja manajerial sebagai bentuk pengukuran kinerja keuangan disebabkan oleh kinerja manajerial mencakup SKPD. Dalam hal ini SKPD merupakan salah satu hal penting dalam sisi kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan satuan unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas anggaran dan belanja daerah.

Dalam penentuan pengukuran kinerja keuangan diperlukan hal-hal yang menyangkut dengan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal-hal yang telah disebutkan diatas dapat diukur dengan kinerja manajerial. Kinerja manajerial diukur dengan menggunakan 9 item menurut Mahoney et al (Wati Sitohang,2018). Tingkat kinerja manajerial disetiap bidang yang meliputi :

- a) Perencanaan : mampu dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program serta mampu menentukan langkah-langkah yang akan diambil.
- b) Investigasi : mampu dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan atau laporan yang sesuai dengan target yang realistis dan akurat yang berhubungan dengan divisi.
- c) Pengkoordinasian : mampu bekerja sama dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan atau menyesuaikan laporan dan menyelesaikan program kerja dan kebijakan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan antar divisi.
- d) Evaluasi : mampu mengevaluasi dan menilai rencana kerja, serta menyerahkan laporan kinerja maupun kegiatan kerja yang diamati pada divisi dengan tepat waktu.
- e) Pengawasan : mampu dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan atau karyawan yang ada pada divisi.

- f) Pemilihan Staf : mampu dalam menyeleksi orang yang akan bekerja di divisi sesuai dengan kemampuannya sendiri, juga mengelola, mengatur, dan mempromosikan, karyawan di divisi yang berprestasi untuk naik jabatan.
- g) Negoisasi : mampu melakukan kontak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada divisi dengan pihak luar atau kontrak dalam guna meningkatkan pendapatan.
- h) Perwakilan/Representasi : mampu mewakili divisi/organisasi untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi atau menghadiri pertemuan dengan seluruh satuan kerja pemda bogor/pemerintah daerah lain serta melakukan dialog, pidato kemasyarakatan, (turun langsung ke masyarakat).
- i) Kinerja secara keseluruhan : mengerti kejelasan sasaran kinerja dalam program/kegiatan yang sesuai dengan visi misi dan ditetapkan dengan rencana strategic organisasi.

Tingkat kinerja manajerial tersebut merupakan faktor-faktor terpenting untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan tolak ukur kinerja manajerial. Tingkat manajerial tersebut merupakan perhitungan partisipasi anggaran yang berbasis kinerja dan memiliki suatu bentuk yang efektif, efisien, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, mengukur kinerja manajerial untuk pelaksanaan kegiatan suatu organisasi perlu mengetahui apakah dalam tahap-tahap dalam penyusunan anggaran sudah sesuai proses-proses yang berlaku.

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Dede Sunandaning Ramdani (2016)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kualitas LAKIP pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2010-2014	Variabel independen komitmen organisasi, perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, evaluasi kinerja variabel dependen : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.Komitmen organisasi 2.Perencanaan anggaran 3.Pelaksanaan anggaran 4.Pelaporan perencanaan 5.Evaluasi kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pelaporan/pe rtanggungjaban dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja	Dede Sunandang Ramdani Universitas Pakuan

					instansi pemerintah	
2	Safaruddin dan Sutriana Basri (2017)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)	Variabel independen : perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja variabel dependen : akuntabilitas kinerja	1.Perencanaan anggaran 2.Implementasi anggaran 3.Pelaporan anggaran 4.Evaluasi kinerja 5.LAKIP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kota Kendari yang artinya bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas publiknya.	Safaruddin dan Sutriana Basri (2017) Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara https://scholar.google.co.id
3	Debby Febriyanti (2018)	Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Periode 2012-2016	Variabel independen anggaran berbasis kinerja variabel dependen : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.Pelaksanaan anggaran 2.Capaian kinerja 3.Pertumbuhan kinerja	Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa capaian dan pertumbuhan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Debby Febriyanti (2018) Universitas Pakuan

4	Dewi Kurniasari, Dedeh Kurniasari, M. Sandi Marta (2017)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat	Variabel independen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja variabel dependen : efektivitas pengendalian anggaran	1.Perencanaan anggaran 2.Pelaksanaan anggaran 3.Pelaporan/pertanggungjawaban 4.Evaluasi kinerja	Secara parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran tetapi untuk evaluasi kinerja memiliki pengaruh negative sedangkan pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran	Dewi Kurniasari, Dedeh Kurniasari, M. Sandi Marta (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung https://scholar.google.co.id
5	Wati Sitohang (2018)	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial di dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan kabupaten bogor tahun 2013-2016	Variabel independen : anggaran berbasis kinerja variabel dependen : kinerja manajerial	1.Persiapan 2.Ratifikasi 3.Implementasi 4.Evaluasi dan pelaporan 5.Perencanaan 6.Investigasi 7.Pengkoordinasian 8.Evaluasi 9.Pengawasan 10.Pemilihan staf 11.Negoisasi 12.Perwakilan 13.Kinerja keseluruhan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan kabupaten bogor	Wati Sitohang (2018) Universitas Pakuan

2.4.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Erlina (2008 :38) kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Hubungan yang dijelaskan adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel yang lain yang menyertainya.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Dede Sunandang Ramdani (2016) yang meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kualitas lakip pada dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten bogor tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Safaruddin dan Sutriana Basri (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah (studi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota kendari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota kendari yang artinya bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas publiknya.

Debby Febriyanti (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas bina marga dan pengairan kabupaten bogor periode 2012-2016. Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa capaian dan pertumbuhan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

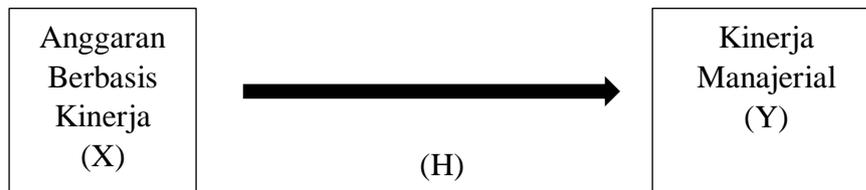
Dewi Kurniasari, Dedeh Kurniasari, M. Sandi Marta (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bandung barat. Hasil penelitian secara parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran tetapi untuk evaluasi kinerja memiliki pengaruh negatif sedangkan pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 serta Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kinerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran, disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang direncanakan pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001 menciptakan terbentuknya pemerintah daerah otonomi di Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial yaitu anggaran pada instansi pemerintah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian serta berfungsi sebagai instrument akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik, karena penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan instansi pemerintah.

Adapun menurut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Wati Sitohang (2018) menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan kabupaten bogor. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja ini dan dengan adanya pemahaman yang benar dapat menghilangkan rasa saling curiga, tidak percaya dan terwujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga pemerintah yang baik dapat bersama-sama diwujudkan. Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatkan skema kerangka pikir untuk lebih jelasnya kerangka pikir dibuat dalam bentuk skema berikut ini :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Hipotesis : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat analisis penelitian. Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat pengaruh dari Anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Ha : Terdapat pengaruh dari Anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Gambar 2.2

Hipotesis Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam meneliti adalah penelitian Kuantitatif, yaitu berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antara variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Peneliti menggunakan desain peneliti kausal dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan data primer, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Variabel Independen berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial sebagai Variabel Dependen.

Tabel 3.1
Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

Jenis/Bentuk Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Penelitian
Deskriptif (Development)	Deskriptif Survai	<ul style="list-style-type: none">▪ Statistik Analisis▪ Statistik Kualitatif/Kuantitatif▪ Statistik Komparatif

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat yang meliputi Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Manajerial pada Pemerintahan. Objek penelitian dilakukan hanya pada satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adapun SKPD yang terpilih yaitu Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah).

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditemukan berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, merupakan elemen yang penting dalam penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organization, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bogor. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala SKPD serta Pelaksana Teknis SKPD yang berada pada Pemerintahan Kabupaten Bogor.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor yang meliputi 40 Kecamatan dan 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepatnya disalah satu SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor dengan Alamat Jalan Segar III Kav. 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor, Cibinong – Bogor, Jawa Barat 16914, Indonesia. Telepon : (021)87906240.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah Data Deskriptif Kuantitatif yang merupakan Data Primer yang diperoleh melalui Riset langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bogor. Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data subjek kuantitatif yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, opini, sikap, pengalaman dari responden yang menjadi subjek penelitian. Kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah kuisisioner yang dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu/orang dalam perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: media masa, perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang digunakan peneliti dalam penelitian sebelumnya, data yang disediakan pada statistic software, dsb.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner yang telah disajikan oleh peneliti.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrumen penelitian untuk pengelolaan data selanjutnya. Operasional Variabel merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan bagaimana cara mengukur dan penilaian alat ukur (Sofyan Syafri 2013:10).

Dalam memudahkan proses analisis, maka sebelumnya penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen X¹ (Variabel Bebas)

Merupakan Variabel yang menjadi sebab atau merubah/mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Juga sering disebut dengan variabel bebas, predictor, stimulus, eksogen, dan variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel terikat dan respon (Sofyan Syafri 2013:10). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja atau sebagai X¹.

2. Variabel Dependen X² (Variabel Tidak Bebas)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabel respons (Sofyan Syafri 2013:10). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah Kinerja Manajerial.

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel

“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019”

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja (Variabel X)	a. Persiapan	Selaras dengan visi-misi dan tujuan.	Ordinal (STS, TS, N, S, SS)
	b. Ratifikasi	Mengikuti proses prosedur yang berlaku.	
	c. Implementasi	Kejelasan dan ukuran indikator kinerja.	
	d. Evaluasi dan Pelaporan	Sesuai dengan prioritas program pengeluaran daerah.	
Kinerja Manajerial (Variabel Y)	a. Perencanaan	Mampu menyusun anggaran dan program.	Ordinal (STS, TS, N, S, SS)
	b. Investigasi	Mampu mengumpulkan informasi berbentuk laporan.	
	c. Pengkoordinasian	Mampu tukar-menukar informasi antar divisi.	
	d. Evaluasi	Mampu menilai rencana kerja.	
	e. Pengawasan	Mampu mengarahkan kemampuan bawahan atau karyawan.	
	f. Pemilihan Staf	Mampu memilih orang sesuai kompetensi dan prestasi.	
	g. Negoisasi	Mampu menjalin kontrak barang/jasa yang dibutuhkan.	
	h. Perwakilan	Mampu melakukan dialog, pidato kemasyarakatan.	
	i. Kinerja Keseluruhan	Mengerti kejelasan sasaran kinerja sesuai dengan visi-misi.	

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi penelitian adalah sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang dapat dikategorikan kedalam objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Menurut Sugiyono (2013) dalam Bukunya “Metode Penelitian” Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 78 dari 132 pegawai, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampel Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2013) Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka diperlukan data dan informasi yang mendukung. Dalam penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.6.1 Riset Lapangan

Penelitian dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan yang dijadikan objek penelitian dengan cara :

- a. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dihasilkan.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab dengan staf yang berwenang mengenai masalah yang diteliti.

3.6.2 Riset Kepustakaan

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau dalam bentuk teori dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti berbagai macam literature, seperti buku-buku, catatan diktat perkuliahan, skripsi, hand-out, serta data-data lainnya yang dapat dijadikan referensi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif. Penelitian ini berkaitan dengan opini, kejadian atau prosedur”. Menurut Sugiyono

(2013), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Jenis penelitian ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor serta mengemukakan tentang data diri responden yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuisiener berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan yang diklasifikasikan sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Pengelolaan Skala Pengukuran dalam Kuisiener

Notasi	Nilai	Keterangan
Sangat Setuju (SS)	5	Jawaban apabila responden sangat setuju dengan pertanyaan dalam kuisiener.
Setuju (S)	4	Jawaban apabila responden setuju dengan pertanyaan dalam kuisiener.
Netral (N)	3	Jawaban apabila responden Netral, antara Setuju atau Tidak Setuju.
Tidak Setuju (TS)	2	Jawaban apabila responden tidak setuju dengan pertanyaan dalam kuisiener.
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	Jawaban apabila responden sangat tidak setuju dengan pertanyaan dalam kuisiener.

Setelah diperoleh skor keseluruhan dari pernyataan mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja maupun pencapaian kinerja manajerial, maka dapat diketahui apakah anggaran berbasis kinerja dan kinerja manajerial masuk dalam kategori sangat buruk, buruk, netral, baik, atau sangat baik dengan dilakukannya perhitungan tabel akumulatif berdasarkan kriteria ideal perhitungan kuisiener.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Suatu kuisiener dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisiener mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisiener tersebut. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuisiener. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisa korelasi bilvariate dengan melihat output pearson correlation (Ghozali, 2013). Dengan kriteria jika nilai sig.(2-tailed) pada total skor konstruk <0.05 item pertanyaan/pernyataan dikatakan valid.

3.7.2.2 Uji Reabilitas

Suatu kuisiener dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap apa pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisiener yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Dengan demikian uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuisiener-kuisiener penelitian.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan 3 alat uji (Ghozali, 2013), yaitu :

- 1) Uji Kolmogorov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :
 - a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal.
 - b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal.
- 2) Histogram, yaitu pengujian dengan menggunakan ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data menceng ke kanan atau menceng ke kiri berarti memberitahukan bahwa data tidak berdistribusi secara normal.
- 3) Grafik Normality Probability Plot, ketentuan yang digunakan adalah :
 - a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
 - b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke satu pengamatan lainnya tetap, maka disebut Heterokedastisitas. Dan jika varian berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai predikat variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y residual $- Y$ sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % dan derajat kebebasan $df = n - k$. kriteria pengambilan keputusan: jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak (H_a diterima) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima (H_a ditolak).

3.7.4.2 Adjusted R (Uji R)

Pengujian adjusted (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen dengan adanya uji R^2 ini terlihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel, “adjusted dianggap lebih baik dari R^2 karena nilai adjusted R^2 dapat naik ataupun turun apabila ada suatu variabel independen” (Ghozali, 2013).

Jika $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2015-2019 yang bersumber dari data primer dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang menjadi sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1 Sejarah Perkembangan Kabupaten Bogor

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya. Penggalan untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukahati (Sekarang Kampung Empang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis *Hoofd Van de Negorij* Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ‘ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan’. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu :

1. Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.
2. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 orang raja. Berkuasa sejak tahun 516 sampai dengan tahun 852.
3. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 orang raja. Berkuasa sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482.

4. Kerajaan Pajajaran, Berkuasa sejak tahun 1482 sampai dengan tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui siding pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kotamadya Bogor atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi (Rancamaya), Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor. Oleh karena itu atas petunjuk pemerintah Pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor

Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dituju, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, sehingga berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kerja. Untuk itu, dapatlah dikaitkan bahwa urgensi keterukuran visi dan misi maka akan mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang diperintahkan dalam suatu program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun Visi Kabupaten Bogor adalah Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban sedangkan Misi nya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kesalehan sosial.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dengan menyusun visi dan misi, pembangunan daerah diharapkan dapat menyentuh pada kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan melakukan penjangkauan aspirasi dari bawah ke atas (bottom up), mengetahui permasalahan yang dihadapi

masyarakat serta menemukan solusi yang tepat guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Pembangunan daerah harus dapat melibatkan segala macam elemen masyarakat, swasta dan pemerintah dengan mengelaborasi dan memadukan rencana pembangunan daerah selama periode tertentu, contoh : RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja), atau dokumen sejenisnya. Dokumen perencanaan inilah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun.

Oleh karena itu kepala daerah harus membuat konsep visi dan misi pembangunan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan RPJPD sehingga bisa lebih realistis dan menyentuh pada pembangunan daerah lebih terarah, tertata, dan terencana dengan matang.

4.1.3 Aspek Geografis Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor terletak diantara 6°18'0" - 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45"- 107°13'30" Bujur Timur. Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah dibagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter diatas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl, dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan bantuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa, dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Pedsolik, dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah dibagian selatan dan iklim tropis basah dibagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500-5.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°-30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi didaerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Sebagian secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 8 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian, (2) DAS Cimanceuri, (3) DAS Cisadane, (4) DAS Ciliwung, (5) Sub DAS Kali Bekasi, (6) Sub DAS Cipamingkis, dan (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintahan, 900 jaringan irigasi pedesaan, 95 situ dan 96 mata air.

Luas wilayah Kabupaten Bogor memiliki seluas 298.838,31 Ha yang terbagi atas 40 Kecamatan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan dua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin.

Dengan adanya pemekaran desa tersebut, maka jumlah desa di Kabupaten Bogor yang pada tahun 2011 berjumlah 431 desa, bertambah sebanyak empat desa padatahun 2012, sehingga total desa dan kelurahan hingga sekarang di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 menjadi 417 desa dan 17 kelurahan (434 desa/kelurahan), dengan 3.941 RW dan 15.874 RT.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bogor :

- Utara : Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi
- Timur : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta
- Selatan: Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
- Barat : Kabupaten Lebak
- Tengah: Kota Bogor

Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola penggunaan tanah hasil interpretasi Alos tahun 2010, dikelompokkan menjadi kawasan non terbangun, kawasan terbangun dan penggunaan lahan lain-lain. Kawasan non terbangun mencakup 88,03 persen dari total luas wilayah. Pola kawasan ini mendominasi pola penggunaan tanah di Kabupaten Bogor, yang terdiri dari hutan seluas 14,32%, sawah seluas 11,74%, kebun campuran seluas 23,25%, dan semak belukar seluas 17,37%. Kawasan terbangun mencakup 11,08 persen dari total luas wilayah, yang terdiri dari pemukiman, kawasan pertambangan/galian serta kawasan dan zona industri.

Penggunaan lahan lain-lain mencakup 0,89% dari total luas wilayah, yang terdiri dari sungai/badan air/danau waduk/situ seluas 0,85% rawa 0,03%, dan tambak /empang seluas 0,01%.

Penduduk Kabupaten Bogor menurut estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) (angka sementara sekarang) yaitu berjumlah 5.111.769 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.616.962 jiwa dan penduduk perempuan 2.494.807 jiwa. Terdapat 11 Kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk (LPP) lebih tinggi dari pada LPP Kabupaten Bogor yang hanya 2,44%. LPP terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri 4,83%. Sementara di Kecamatan Cibinong, sebagai ibukota Kabupaten Bogor, LPP mencapai 3,73%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembanagan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupateb Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Secretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur staff Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bogor, baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor. Dinas Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara keseluruhan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah.

4.1.4 Sejarah dan Perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan PerBup tersebut Bappedalitbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappedalitbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappedalitbang Kabupaten Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 132 orang yang terdiri dari 78 orang PNS dan 32 orang tenaga kontrak. Selain itu, dibantu pula oleh 11 orang petugas keamanan, 11 orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bappedalitbang seluruhnya berjumlah 132 orang.

Visi :“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia.”

Misi : “Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana, meningkatkan hasil guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan, mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.”

4.1.5 Kegiatan Usaha

1. Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah saat ini sebanyak 132 orang yang terdiri dari 78 orang PNS dan 32 orang tenaga kontrak. Selain itu, dibantu pula oleh 11 orang petugas keamanan, 11 orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bappedalitbang seluruhnya berjumlah 132 orang.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian kegiatan pada Badan;
 - Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
 - Penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
 - Penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan**

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi serta pelaporan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - Pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;
 - Pengelolaan situs web Badan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - Pengelolaan barang/jasa Badan;
 - Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) **Sub Bagian Keuangan**

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - Penatausahaan keuangan Badan;
 - Penyusunan pelaporan keuangan Badan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
 - Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
 - Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1) **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
 - Penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) **Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
 - Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Data dan Informasi

1. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - Penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata

1. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

1. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja

1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil

pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

1. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Pemerintahan

1. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pemerintahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- Pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

1. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan

evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Penyiapan bahan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - Pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang
 - Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Ekonomi dan Pembangunan;
 - Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

1. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - Penyiapan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - Penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

- Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Deskripsi Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisisioner dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 15 November 2020 – 23 Maret 2021. Dari 70 kuisisioner yang disebar terdapat 50 kuisisioner yang diterima dan dapat diolah oleh penulis.

Adapun rincian perindustrian kuisisioner tersebut dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.1
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Presentase
1	Distribusi Kuisisioner	70	100%
2	Kuisisioner yang Kembali	50	71%
3	Kuisisioner yang dapat diolah	50	71%

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis, 2021

Responden terdiri dari kepala dinas, kepala bagian, sekretaris dan staf yang menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, sebanyak 50 kuisisioner yang dikembalikan oleh responden, dan dapat dipergunakan dalam pengolahan data. Adapun karakteristik responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Pengelompokan Responden		Frekuensi	Presentase 100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	100%
	Perempuan	22	
Pendidikan Terakhir	SMU/SMK	5	100%
	D3	2	
	D4	-	
	S1	33	
	S2	10	
	S3	-	
Jabatan/Bagian	Kepala Dinas/Badan	-	100%
	Kepala Bidang	-	
	Sekretaris	9	
	Staff	41	

Lama Bekerja	<1 Tahun	4	100%
	1-5 Tahun	8	
	5-10 Tahun	9	
	>10 Tahun	29	

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis, 2021

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 28 orang atau sekitar 28% lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan yang berjumlah 22 orang atau sekitar 22% dari jumlah keseluruhan responden.

b. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran secara langsung lebih banyak bergelar Sarjana (S1) yaitu sekitar 33 orang, gelar Sarjana (S2) 10 orang, lulusan SMU/SMK 5 orang dan gelar Diploma (D3) sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebagian besar pendidikan sarjana sehingga diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dibidangnya masing-masing.

c. Jabatan/Bagian

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden adalah staff yaitu sebanyak 41 orang dan sekretaris 9 orang.

d. Lama Bekerja

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang paling lama bekerja adalah sebanyak 29 orang dengan lama bekerja >10 tahun, 9 orang dengan lama bekerja 5-10 tahun, 8 orang dengan lama bekerja 1-5 tahun dan 4 orang dengan lama bekerja <1 tahun.

4.2.2 Deskripsi Anggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel kinerja manajerial (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju(S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengaruh anggaran berbasis kinerja (X) dan kinerja manajerial (Y) yang terdapat dalam kuisioner yaitu :

Tabel 4.3
Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Pertanyaan	Penilaian Responden										Jml	Rata-rata
	STS(1)		TS(2)		N(3)		S(4)		SS(5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	0	0	0	0	4	8	24	48	22	44	50	4,36
2	0	0	2	4	2	4	23	46	23	46	50	4,34
3	2	4	3	6	3	6	21	42	21	42	50	4,12
4	2	4	3	6	0	0	26	52	19	38	50	4,14
Total rata-rata												4,24

Sumber : Data primer, data diolah penulis, 2021

Berdasarkan data tabel 4.3, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 mengenai Persiapan yaitu Penyusunan anggaran telah selaras dengan visi, misi dan tujuan serta realistis (dapat dicapai) dan menggambarkan hasil (output dan outcome) serta berdasarkan value for money, responden menanggapi sangat setuju sebesar 44%, setuju sebesar 48%, netral sebesar 8%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 0% dengan nilai rata-rata 4,36. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa penyusunan anggaran telah sesuai dengan visi misi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 2 mengenai Ratifikasi yaitu Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah serta pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku, responden menanggapi sangat setuju sebesar 46%, setuju sebesar 46%, netral sebesar 4%, tidak setuju sebesar 4%, dan sangat tidak setuju sebesar 0% dengan nilai rata-rata 4,34. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa dalam ratifikasi yaitu anggaran yang dirancang serta pengalokasian dana anggaran sudah mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku dimana pos belanja daerah yang tercantum dalam APBD sesuai dengan standar belanja/indeks harga yang berlaku serta menunjukkan angka/jumlah yang rasional (tidak overestimate).

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 3 mengenai Implementasi yaitu Dalam pelaksanaan anggaran sudah dapat dipertanggungjawabkan karena indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur, responden menanggapi sangat setuju sebesar 42%, setuju sebesar 42%, netral sebesar 6%, tidak setuju sebesar 6%, dan sangat tidak setuju 4% dengan nilai rata-rata 4,12. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa pelaksanaan anggaran sudah dapat dipertanggungjawabkan karena indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur.

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 4 mengenai Evaluasi dan pelaporan yaitu Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD telah sesuai dengan prioritas program pengeluaran daerah dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU), responden menanggapi sangat setuju sebesar 38%, setuju sebesar 52%, netral sebesar 0%, tidak setuju 6%,

dan sangat tidak setuju 4% dengan nilai rata-rata 4,14. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa anggaran belanja daerah telah sesuai dengan prioritas program pengeluaran daerah dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam arah kebijakan umum.

4.2.3 Deskripsi Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel kinerja manajerial (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju(S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengaruh anggaran berbasis kinerja (X) dan kinerja manajerial (Y) yang terdapat dalam kuisioner yaitu :

Tabel 4.4
Kinerja Manajerial (Y)

Pertanyaan	Penilaian Responden										Jml	Rata-rata
	STS(1)		TS(2)		N(3)		S(4)		SS(5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	0	0	0	0	4	8	30	60	16	32	50	4,24
2	0	0	1	2	3	6	25	50	21	42	50	4,32
3	1	2	5	10	4	8	24	48	16	32	50	3,98
4	0	0	0	0	4	8	26	52	20	40	50	4,32
5	1	2	0	0	3	6	26	52	20	40	50	4,28
6	1	2	0	0	3	6	26	52	20	40	50	4,28
7	0	0	0	0	5	10	26	52	19	38	50	4,28
8	0	0	0	0	4	8	21	42	25	50	50	4,42
9	0	0	2	4	9	18	20	40	19	38	50	4,12
Total rata-rata												4,25

Sumber : Data primer, data diolah penulis, 2021

Berdasarkan data tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 mengenai Perencanaan yaitu Kemampuan merencanakan penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program, responden menanggapi sangat setuju sebesar 32%, setuju sebesar 60%, netral sebesar 8%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 0% dengan nilai rata-rata 4,24. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa dalam penyusunan kinerja keuangan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 2 mengenai Investigasi yaitu Kemampuan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan atau laporan yang sesuai dengan target yang realistis dan akurat yang berhubungan dengan divisi dalam dinas tersebut, responden menanggapi sangat setuju sebesar 42%, setuju sebesar 50%, netral sebesar 6%, tidak setuju sebesar 2%, dan sangat tidak setuju sebesar 0% dengan nilai rata-rata 4,32. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden mampu menyiapkan catatan atau laporan yang berhubungan dengan divisi dari masing-masing responden.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 3 mengenai Pengkoordinasian yaitu Kemampuan responden bekerjasama dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan atau menyesuaikan laporan dan menyelesaikan program kerja dan kebijakan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan antar divisi, responden menanggapi sangat setuju sebesar 32%, setuju sebesar 48%, netral sebesar 8%, tidak setuju sebesar 10%, dan sangat tidak setuju 2% dengan nilai rata-rata 3,98. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden mampu dalam mengkoordinasikan mengenai laporan dan program kerja dengan baik.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 4 mengenai Evaluasi yaitu Kemampuan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, serta menyerahkan laporan kinerja dengan tepat waktu, responden menanggapi sangat setuju sebesar 40%, setuju sebesar 52%, netral sebesar 8%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0% dengan nilai rata-rata 4,32. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden mampu dengan baik mengevaluasi dan menilai rencana kerja, serta menyerahkan laporan kinerja maupun kegiatan kerja yang diamati dan diserahkan tepat waktu.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 5 mengenai Pengawasan yaitu Kemampuan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para divisi atau karyawan yang ada di divisi maupun luar divisi, responden menanggapi sangat setuju sebesar 40%, setuju sebesar 52%, netral sebesar 6%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 2% dengan nilai rata-rata 4,28. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden mampu mengarahkan, memimpin dan mengembangkan karyawan atau bawahan dengan baik.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 6 mengenai Pemilihan staf yaitu Kemampuan dalam menyeleksi orang yang akan bekerja di divisi yang bisa mengelola, mengatur tugas dan aktivitas di divisi yang akan dipromosikan untuk naik jabatan karena prestasinya, responden menanggapi sangat setuju sebesar 40%, setuju sebesar 52%, netral sebesar 6%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 2% dengan nilai rata-rata 4,28. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa dalam pemilihan staf bisa dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 7 mengenai Negosiasi yaitu Kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan divisi, responden menanggapi sangat setuju sebesar 38%, setuju sebesar 52%, netral sebesar 10%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju 0% dengan nilai rata-rata 4,28. Berdasarkan hasil jawaban responden

diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden dapat melakukan kontrak barang/jasa yng dibutuhkan divisi dengan baik.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 8 mengenai Perwakilan yaitu Mampu mewakili divisi untuk menghadiri pertemuan dengan seluruh satuan kerja pemerintahan daerah bogor maupun pemerintahan daerah lain, responden menanggapi sangat setuju sebesar 50%, setuju sebesar 42%, netral sebesar 8%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0% dengan nilai rata-rata 4,42. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden bisa dengan baik mewakili divisi untuk mewakili divisinya dalam pertemuan pemerintahan daerah maupun antar pemerintahan daerah lain.

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pertanyaan nomer 9 mengenai Kinerja secara menyeluruh yaitu Kemampuan memahami dan mengerti kejelasan sasaran kinerja dalam program/kegiatan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan dengan rencana strategik divisi, responden menanggapi sangat setuju sebesar 38%, setuju sebesar 40%, netral sebesar 18%, tidak setuju 4%, dan sangat tidak setuju 0% dengan nilai rata-rata 4,12. Berdasarkan hasil jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa responden telah mengerti kejelasan sasaran kinerja dalam program/kegiatan yang ditetapkan dengan rencana strategik organisasi dengan baik.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Untuk mengetahui sah tidaknya suatu kuisisioner dan dapat dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataannya mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut, maka pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output Person Correlation. Dengan kriteria :

1. Jika $\text{sig (2-tailed)} < 0,05 = \text{valid}$
2. Jika $\text{sig (2-tailed)} > 0,05 = \text{tidak valid}$

Signifikansi dilihat dari kolom total dari setiap item pertanyaan atau pernyataan

Tabel 4.5
 Hasil Uji Validitas Variabel (X) Anggaran Berbasis Kinerja

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X.JUMLAH
X1.1	Pearson Correlation	1	,732**	,491**	,506**	,780**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	,732**	1	,603**	,653**	,885**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	,491**	,603**	1	,478**	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	,506**	,653**	,478**	1	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	50	50	50	50	50
X.JUMLAH	Pearson Correlation	,780**	,885**	,811**	,817**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Tabel 4.6
 Hasil Uji Validitas (Y) Kinerja Manajerial

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y.JUM LAH
Y1.1	Pearson Correlation	1	,513**	,595**	,565**	,440**	,440**	,628**	,590**	,430**	,750**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,001	,000	,000	,002	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.2	Pearson Correlation	,513**	1	,368**	,668**	,494**	,533**	,771**	,711**	,425**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,000		,009	,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.3	Pearson Correlation	,595**	,368**	1	,405**	,385**	,358*	,455**	,459**	,532**	,700**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009		,004	,006	,011	,001	,001	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.4	Pearson Correlation	,565**	,668**	,405**	1	,457**	,631**	,694**	,680**	,468**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004		,001	,000	,000	,000	,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.5	Pearson Correlation	,440**	,494**	,385**	,457**	1	,679**	,509**	,593**	,360*	,719**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,006	,001		,000	,000	,000	,010	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.6	Pearson Correlation	,440**	,533**	,358*	,631**	,679**	1	,593**	,509**	,328*	,736**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,011	,000	,000		,000	,000	,020	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.7	Pearson Correlation	,628**	,771**	,455**	,694**	,509**	,593**	1	,701**	,613**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.8	Pearson Correlation	,590**	,711**	,459**	,680**	,593**	,509**	,701**	1	,468**	,818**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000		,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y1.9	Pearson Correlation	,430**	,425**	,532**	,468**	,360*	,328*	,613**	,468**	1	,695**
	Sig. (2-tailed)	,002	,002	,000	,001	,010	,020	,000	,001		,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y.JUM LAH	Pearson Correlation	,750**	,782**	,700**	,794**	,719**	,736**	,857**	,818**	,695**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Jika dilihat dari tabel Uji Validitas, Variabel X dan Y dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. (2-tailed) pada kolom total untuk setiap pernyataan pada setiap variabel $< 0,05$ hal ini sesuai dengan kriterianya jika nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka pernyataan dikatakan valid.

Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pernyataan dapat mengetahui jawaban responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuisioner yang dibagikan kepada responden, dapat disajikan sebagai alat ukur yang tepat.

4.3.1.2 Uji Reabilitas

Untuk mengukur handal atau tidaknya kuisisioner yang digunakan dalam variabel penelitian, metode yang digunakan untuk mengukur reabilitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronchbach's* dimana instrument penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,60.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas Variabel (X) Anggaran Berbasis Kinerja
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	5

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Dari pengujian terhadap reabilitas kuisisioner menghasilkan angka *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu 0,818. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pernyataan dalam kuisisioner memiliki reabilitas yang tinggi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas Variabel (Y) Kinerja Manajerial
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,778	10

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Dilihat dari hasil pengujian ini, pernyataan dalam kuisisioner menunjukkan reliabel atau handal, hal ini dapat dibuktikan dari nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu 0,778 sehingga merupakan alat ukur yang handal.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Namun jika hasil Kolmogrov Simirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4.9
 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,40229923
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,078
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,159 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas pada signya terdapat nilai sebesar 0,159 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal tidak terjadi masalah normalitas.

Uji autokorelasi adalah keadaan terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu penamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Suatu model dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai DW berada di antara $DU < DW < 4-DU$. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi di dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

		Unstandardized Residual
Test Value ^a		-,29094
Cases < Test Value		25
Cases >= Test Value		25
Total Cases		50
Number of Runs		20
Z		-1,715
Asymp. Sig. (2-tailed)		,086

a. Median

Sumber: SPSS (2021)

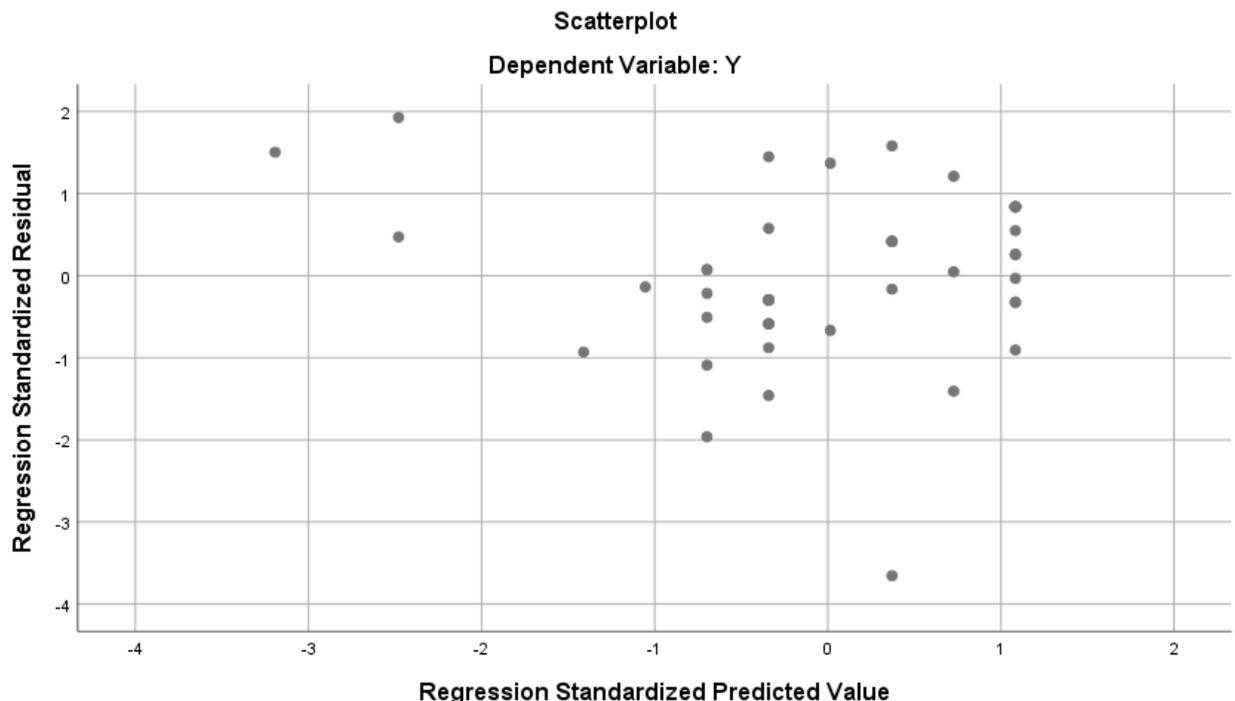
Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,086 yang menunjukkan ($0,086 > 0,05$) maka data dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.3.2.2 Uji Heterokedasitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastitas. Jika *variance* berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ Prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di - studentized. Dasar analisis:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas:



Gambar 4.1
Diagram Scatterplot

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedasitas.

4.3.3 Uji Hipotesis

4.3.3.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, hal ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, hal ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Manajerial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor .

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,580	3,479		3,616	,001
	X1	,210	,135	,226	1,555	,127
	X2	-,753	,498	-,238	-1,511	,138
	X3	1,174	,364	,463	3,225	,002
	X4	1,248	,269	,501	4,640	,000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel diatas, variabel anggaran berbasis kinerja memiliki nilai t-hitung sebesar 4,640 dengan taraf signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05, sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,676 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel (4,640>1,676) yang menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara signifikan mempengaruhi Kinerja Manajerial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian intern secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, yaitu keandalan pelaporan keuangan yang diuji pada tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.11
Hasil uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1072,287	4	268,072	30,916	,000 ^b
	Residual	390,193	45	8,671		
	Total	1462,480	49			
a. Dependent Variable: Y1						
b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2						

Sumber: SPSS (2020)

Uji F dimana nilai signifikan (sig) kurang dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka H5 diterima.

4.3.3.2 Uji Adjusted R (Uji R²)

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel, dalam hal ini adjusted digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan penerapan anggaran berbasis kinerja (X) dalam kinerja manajerial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor (Y). “*adjusted* dianggap lebih baik dari R² karena nilai *adjusted* R² dapat naik ataupun turun apabila ada suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model” (Ghazali,2005).

Tabel 4.11
Hasil Uji Adjusted R (Uji R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,856 ^a	,733	,709	2,945	1,431
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y1					

Sumber : Hasil SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R sebesar 0,709 atau 70,9% hal ini berarti Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 70,9% dan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019, maka dapat dilakukan pembahasan/analisis antara kesesuaian teori dengan praktek yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.12
Perkembangan Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2015-2019
(dalam Rp)

No	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Capaian
1	2015	40.158.095.000	35.752.981.428	4.405.113.572	89,03%	89,09%
2	2016	44.886.594.000	42.524.368.064	2.362.225.936	94,74%	96,87%
3	2017	35.152.350.000	33.980.072.081	1.172.277.919	96,67%	99,02%
4	2018	36.233.680.000	35.673.346.328	560.333.672	98,45%	99,37%
5	2019	20.967.938.000	20.622.442.408	345.495.592	98,35%	99,09%

Sumber : situs web resmi bappeda litbang

Anggaran adalah sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pendapatan dan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, manajemen, prioritas dari pengguna dan pertanggungjawaban kepada publik. Menurut Abdul Hakim (2007;177) anggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun Anggaran 2015 sebesar 40.158.095.000 terealisasi sebesar 35.752.981.428 atau terserap 89,03%. Sisa penyerapan dana belanja langsung sebesar 4.405.113.572 atau sekitar 10,97% dengan tingkat pencapaian kinerja sekitar 89,09% dimana pencapaian kinerja tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan anggaran dan rencana pencapaian kinerja dengan dengan keunggulan 10,91% dibandingkan rencana tahun 2015 dan silpa 10,97%.

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun Anggaran 2016 sebesar 44.886.594.000 terealisasi sebesar 42.524.368.064 atau terserap 94,74%. Sisa penyerapan dana belanja langsung sebesar 2.362.225.936 atau

sekitar 5,26% dengan tingkat pencapaian kinerja sekitar 96,87% dimana pencapaian kinerja tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan anggaran dan rencana pencapaian kinerja dengan dengan keunggulan 3,13% dibandingkan rencana tahun 2016 dan silpa 5,26%.

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun Anggaran 2017 sebesar 35.152.350.000 terealisasi sebesar 33.980.072.081 atau terserap 96,67%. Sisa penyerapan dana belanja langsung sebesar 1.172.277.919 atau sekitar 3,33% dengan tingkat pencapaian kinerja sekitar 99,02% dimana pencapaian kinerja tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan anggaran dan rencana pencapaian kinerja dengan dengan keunggulan 0,98% dibandingkan rencana tahun 2017 dan silpa 3,33%.

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun Anggaran 2018 sebesar 36.233.680.000 terealisasi sebesar 35.673.346.328 atau terserap 98,45%. Sisa penyerapan dana belanja langsung sebesar 560.333.672 atau sekitar 1,55% dengan tingkat pencapaian kinerja sekitar 99,37% dimana pencapaian kinerja tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan anggaran dan rencana pencapaian kinerja dengan dengan keunggulan 0,97% dibandingkan rencana tahun 2018 dan silpa 1,55%.

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun Anggaran 2019 sebesar 20.967.938.000 terealisasi sebesar 20.622.442.408 atau terserap 98,35%. Sisa penyerapan dana belanja langsung sebesar 345.495.592 atau sekitar 1,65% dengan tingkat pencapaian kinerja sekitar 99,09% dimana pencapaian kinerja tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan anggaran dan rencana pencapaian kinerja dengan dengan keunggulan 0,91% dibandingkan rencana tahun 2019 dan silpa 1,65%.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdampak baik terhadap penggunaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan sebagaimana semestinya, walau tak di pungkiri setiap tahun seluruh rencana kerja, rencana strategis badan, misi dan visinya tidak selalu dapat mencapai 100%. Tetapi ada pula beberapa program yang mampu melampaui 100% yang menjadikan keseluruhan pencapaian rata-rata badan mampu melebihi 100% pertahunnya.

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian kinerja dengan tetap mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi-misi dari Kabupaten Bogor maupun visi-misi Badan itu sendiri yaitu Bappeda Litbang. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih luas dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan di wilayah otonomi daerah Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Membangun kerja sama dengan wilayah daerah sekitar Kabupaten Bogor dalam pembangunan agar dapat secara merata dan menyeluruh. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan antar wilayah akan lebih berkembang lagi dan membantu perekonomian warga maupun dalam

meningkatkan fasilitas yang berhubungan erat dengan Badan itu sendiri yaitu Bappeda Litbang.

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, maka dapat dilakukan interpretasi hasil yaitu pada pengujian kualitas data diketahui data variabel X dan Y dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig.(2-tailed) pada kolom total untuk setiap pernyataan pada setiap variabel $<0,05$, sesuai dengan kriterianya jika nilai sig.(2-tailed) $<0,05$ maka pertanyaan dikatakan valid. Dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pernyataan dapat mengetahui jawaban responden sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuisisioner yang dibagikan kepada responden dapat disajikan sebagai alat ukur yang tepat. Berdasarkan dari hasil uji reabilitas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal menunjukkan tingkat reabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dari nilai koefisien *alpha* lebih dari 0,60 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

Dari pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi normal serta bebas dari adanya heteroskedasitas, hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial berpengaruh secara signifikan. Ini dibuktikan dari pengujian terhadap hipotesis dimana hasil perhitungan statistik uji t dengan hasil nilai f hitung lebih besar dari pada t tabel $4,640 > 1,676$ yang berarti secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dan berdasarkan pengujian Hipotesis, jika dilihat dari uji adjusted menunjukkan nilai sebesar 0,709 atau 70,9% dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintahan Bogor.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati Sitohang, 2018 yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan kabupaten bogor. Adapun koefisien determinasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial diperoleh hasil sebesar 42,3%, sehingga diharapkan semua aparatur yang ada di dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan kabupaten bogor melaksanakan anggaran berbasis kinerja lebih baik lagi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan penelitian yang bertujuan untuk menguji mengenai Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden memiliki nilai rata-rata 4,24 yang berada pada interval 3,40-4,19 ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan dengan baik.
2. Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, menurut rekapitulasi tanggapan responden memiliki nilai rata-rata 4,25 yang berada pada diatas 3,40-4,19, dengan ini bisa disimpulkan bahwa kinerja manajerial di Bappeda Litbang sudah terlaksana dengan baik.
3. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor dapat dilihat dari uji dapat dilihat dari uji parsial yang menunjukkan bahwa t -hitung lebih besar dari t -tabel yaitu $4,640 > 1,676$ dengan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$, dan uji *adjusted R* yang menunjukkan nilai sebesar 0,709 atau 70,9% hal ini berarti kinerja manajerial di Bappeda Litbang Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial instansi pemerintahan bogor.

5.2 Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan sebagai berikut :

1. Saran bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor :
 - a. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian kinerja dengan tetap mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi-misi dari Kabupaten Bogor maupun visi-misi Badan itu sendiri yaitu Bappeda Litbang.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih luas dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan di wilayah otonomi daerah Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bogor.
 - c. Membangun kerja sama dengan wilayah daerah sekitar Kabupaten Bogor dalam pembangunan agar dapat secara merata dan menyeluruh. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan antar wilayah akan lebih berkembang lagi dan membantu perekonomian warga maupun dalam meningkatkan fasilitas yang berhubungan erat dengan Badan itu sendiri yaitu Bappeda Litbang.

2. Saran bagi peneliti-peneliti selanjutnya
 - a. Untuk peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk menghindari respon bias akibat penggunaan kuisisioner, karena menggunakan kuisisioner lebih ke *self rating* jadi ada kemungkinan respon dari responden tidak serius dalam memberikan jawaban.
 - b. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah beberapa variabel atau sub variabel dalam Anggaran berbasis kinerjanya yang lebih berpengaruh terhadap kinerja manajerial seperti variabel ketepatan waktu, gaya kepemimpinan dan sebagainya.
 - c. Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan skala ukuran penelitian dengan menggunakan rasio-rasio pengukur kinerja manajerial agar hasilnya lebih akurat serta lebih memperbanyak sampel dalam menentukan objek yang akan diteliti contohnya meneliti lebih dari satu SKPD agar lebih meyakinkan hasil penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

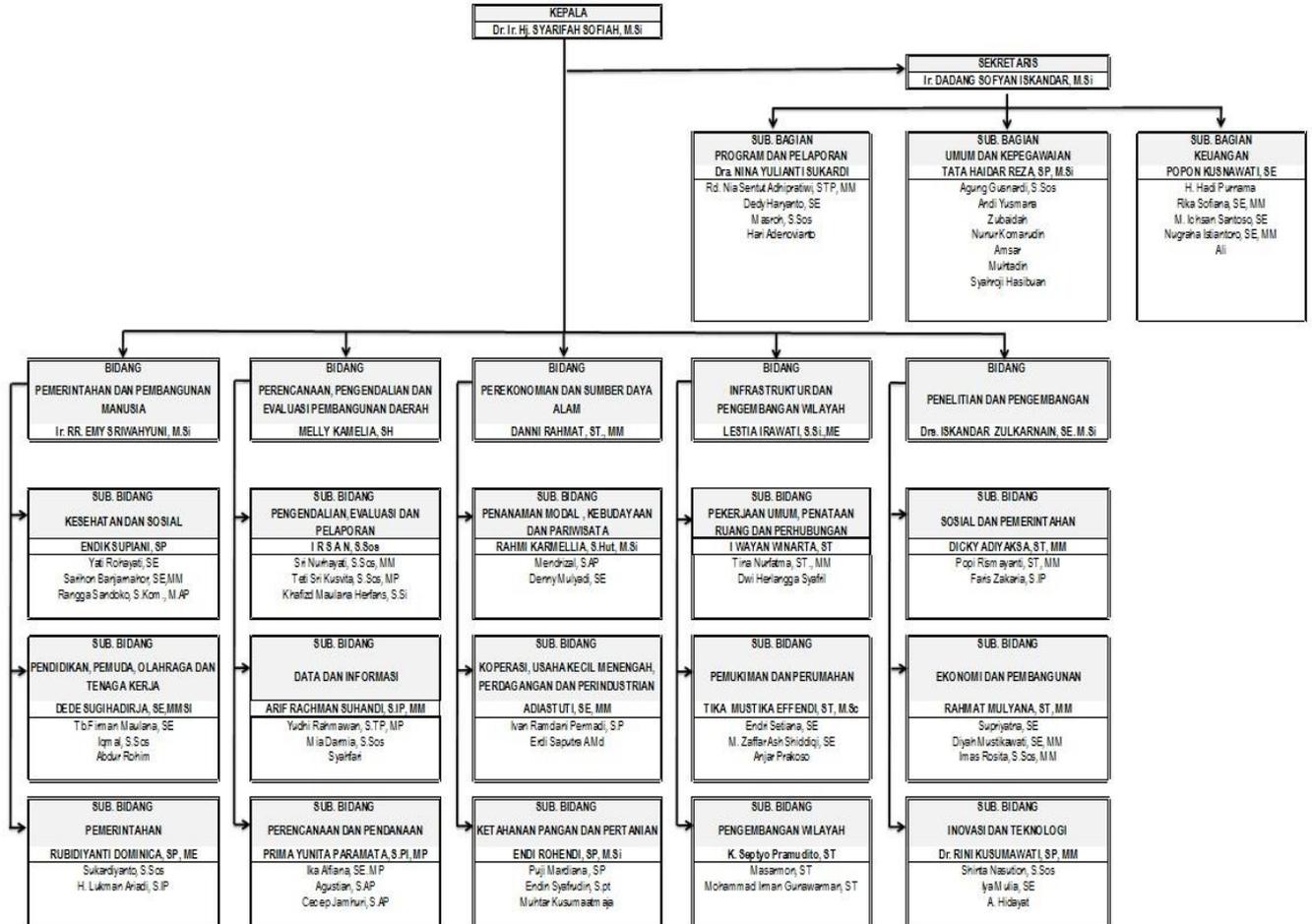
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012), *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi ketiga, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Anggraini, Yunita (2010), *Anggaran berbasis Kinerja*, Edisi Pertama. Yogyakarta
- Bastian, Indra (2010), *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Erlangga
- Chabib Shaleh dan Heru Rohmansyah (2010), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung : Fokus Media
- Dewi Kurniasari, Dedeh Kurniasari, M. Sandi Marta (2017), *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Febriyanti, Debby (2018), *Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Periode 2012-2016*. Bogor, Universitas Pakuan
- Harapan, Sofyan syafri (2013:10), *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta
- Imam Ghozali (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi ke tujuh, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta. Penerbit : Andi
- Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Ramdani, Dede Sunandang (2016), *Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Kualitas Lakip pada Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2010-2014*. Bogor, Universitas Pakuan
- Safaruddin dan Sutriana Basri (2017), *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah*, Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
- Sitohang, Wati (2018), *Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial di dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan kabupaten bogor tahun 2013-2016*. Bogor, Universitas Pakuan
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung
- Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004 Jakarta : Departemen Keuangan RI
- Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan daerah*. 2003. Jakarta
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah daerah*. 2004. Jakarta : Direktorat jndral Otonomi Daerah
- <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019



Lampiran 2.
Kuisisioner

A. DATA IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Golongan :
5. Pendidikan Terakhir : SMU/SMK D3 D4
 S1 S2 S3
6. Jabatan/Bagian :
7. Lama Bekerja : <1 Tahun 1-5 Tahun
 5-10 Tahun >10 Tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur dan apa adanya.
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat persetujuan Bapak/Ibu/Saudara(i) pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut.

Simbol	Kategori
STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
N	Netral
S	Setuju
SS	Sangat Setuju

I. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Variabel X)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	<p>Persiapan Penyusunan anggaran telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan serta realistis (dapat dicapai) dan menggambarkan hasil (output dan outcome) serta berdasarkan value for money</p>					
2.	<p>Ratifikasi Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah serta pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku dimana pos belanja daerah yang tercantum dalam APBD sesuai dengan standar belanja/indeks harga yang berlaku serta menunjukkan angka/jumlah yang rasional (tidak overestimate)</p>					
3.	<p>Implementasi Dalam pelaksanaan anggaran sudah dapat dipertanggungjawabkan karena indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur</p>					
4.	<p>Evaluasi dan pelaporan Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD telah sesuai dengan prioritas program pengeluaran daerah dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU)</p>					

II. Kinerja Manajerial (Variabel Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	<p>Perencanaan Saya mampu dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti</p>					

	penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program serta mampu menentukan langkah-langkah yang akan diambil (Penjadwalan kerja, penganggaran dan program kerja)					
2.	Investigasi Saya mampu dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan atau laporan yang sesuai dengan target yang realistis dan akurat yang berhubungan dengan divisi saya					
3.	Pengkoordinasian Saya mampu bekerjasama dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan atau menyesuaikan laporan dan menyelesaikan program kerja dan kebijakan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan antar divisi					
4.	Evaluasi Saya mampu mengevaluasi dan menilai rencana kerja, serta menyerahkan laporan kinerja maupun kegiatan kerja yang diamati pada divisi saya dengan tepat waktu					
5.	Pengawasan Saya mampu dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan atau karyawan yang ada pada divisi saya					
6.	Pemilihan Staf Saya mampu dalam menyeleksi orang yang akan bekerja di divisi saya sesuai dengan kemampuannya sendiri, saya juga mengelola, mengatur, dan mempromosikan karyawan di divisi saya yang berprestasi untuk naik jabatan					
7.	Negosiasi Saya mampu melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada divisi saya dengan pihak luar atau kontrak dalam (penjualan aset daerah) guna meningkatkan pendapatan					

8.	<p>Perwakilan</p> <p>Saya mampu mewakili divisi/organisasi saya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi atau menghadiri pertemuan dengan seluruh satuan kerja Pemda Bogor/pemerintah daerah lain serta melakukan dialog, pidato kemasyarakatan, (turun langsung ke masyarakat)</p>					
9.	<p>Kinerja secara menyeluruh</p> <p>Saya mengerti kejelasan sasaran kinerja dalam program/kegiatan yang sesuai dengan visi misi dan ditetapkan dengan rencana strategik organisasi</p>					